

**PENGARUH *ENVIRONMENTAL*
PERFORMANCE DAN *ENVIRONMENTAL*
DISCLOSURE TERHADAP
ECONOMIC PERFORMANCE
(Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

EIFFELIENA NURAINI F
C2C006049

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Eiffelienna Nuraini F.
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE* DAN *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* TERHADAP *ECONOMIC PERFORMANCE* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Dosen Pembimbing : Warsito Kawedar, SE, M.Si., Akt

Semarang, 18 November 2010

Dosen Pembimbing,

(Warsito Kawedar, SE, M.Si, Akt)

NIP. 197405101998021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Eiffeliena Nuraini F.

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006049

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE* DAN *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* TERHADAP *ECONOMIC PERFORMANCE* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 10 Desember 2010

Tim Penguji :

1. Warsito Kawedar, SE, M.Si., Akt (.....)
2. Siti Mutmainah, SE, M.Si., Akt (.....)
3. Moh. Didik Ardiyanto, SE, M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EIFFELIENA NURAINI F, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TERHADAP ECONOMIC PERFORMANCE (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, November 2010
Yang membuat pernyataan,

EIFFELIENA NURAINI F.
NIM. C2C006049

ABSTRACT

The objective of this study is to determine the impact of environmental performance and environmental disclosure to economic performance. This type of research conducted is the type of research by testing the hypothesis (Hypothesis testing) which is a study in explaining the phenomenon of the relationship between variables. Data used in this study come from annual reports and sustainable report of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange and PROPER in 2006-2008 with a total of 15 companies. Analysis of the hypothesis used in this study using multiple linear regression and prior to hypothesis testing has been conducted test data normality.

From the results obtained by testing the hypothesis that environmental performance does not affect the economic performance. Test results on the second hypothesis also suggests that environmental disclosure is not significantly influence economic performance. The first findings of the research findings do not support Suratno, et al (2006) and Al-Tuwaijri, et al. (2004). While the latter findings support the findings of Freedman and Jaggi (1992) and in accordance with the findings Almilialia (2007).

Key words: environmental performance, environmental disclosure, economic performance, PROPER

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *environmental performance* dan *environmental disclosure* terhadap *economic performance*. Jenis dari penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian dengan pengujian hipotesis (*Hypothesis testing*) yang merupakan penelitian dalam menjelaskan fenomena hubungan antara variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan PROPER tahun 2006-2008 dengan total 15 perusahaan. Analisis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan sebelum dilakukan uji hipotesis telah dilakukan uji normalitas data.

Dari pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *economic performance*. Hasil pengujian pada hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa *environmental disclosure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *economic performance*. Temuan pertama dalam penelitian tidak mendukung temuan Suratno, dkk (2006) dan Al-Tuwajri, *et al.* (2004). Sedangkan temuan yang kedua mendukung temuan Freedman dan Jaggi (1992) dan sesuai dengan temuan Almilia (2007).

Kata kunci : *environmental performance, environmental disclosure, economic performance, PROPER*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian berjudul ”PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE* DAN *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* TERHADAP *ECONOMIC PERFORMANCE* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui apakah *environmental performance* dan *environmental disclosure* berpengaruh terhadap *economic performance* di Indonesia. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk bantuan, doa, dukungan, perhatian, dan masukan kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si., Akt. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah mendedikasikan waktunya dan menjadi penggerak kemajuan Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Warsito Kawedar, SE, M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, yang senantiasa memberikan waktu untuk membantu penulis selama proses skripsi ini berjalan.
3. Bapak Prof. Dr. Arifin S, M.Com (Hons), Ph.D, Akt. Selaku dosen wali yang selalu memberikan pertimbangan dan nasihat.
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Orangtua tercinta Bapak Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA dan Ibu Sri Winarni, SH atas kesabarannya yang luar biasa serta dukungan dan doa yang tak henti-

hentinya bagi penulis, semoga penulis dapat membanggakan orangtua dan keluarga.

6. Adek-adekku tercinta Imaduddin Zakiy P, Hana Nury Rahmawati P. dan Hani Nur Rahmawati P. dan seluruh keluarga besar yang setiap saat selalu mengingatkan agar penulis segera menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat-sahabat Elis, Yeni, Agy, Gani, Ferri, Yugo, Kuntoro atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin, April, teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan kita berhasil meraih cita-cita.
8. Teman-teman akselerasi SMP N 2 Semarang dan seluruh teman – teman yang ada diluar baik di Semarang atau di luar kota terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuan doanya terutama Mas Andi, Mas Raymond, Mas Robb dan Mbak Linda.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian penelitian ini, kiranya dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima saran dan kritik yang membangun demi penelitian yang lebih baik.

Semarang, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRISI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Legitimacy Theory</i>	10
2.1.2 <i>Stakeholder Theory</i>	13
2.1.3 <i>Sustainable Development</i>	16
2.1.4 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	19
2.1.5 <i>Environmental Performance (Kinerja Lingkungan)</i>	25
2.1.6 <i>PROPER</i>	27
2.1.7 <i>Environmental Disclosure (Pengungkapan Lingkungan)</i>	29
2.1.8 <i>Global Report Initiative (GRI)</i>	31
2.1.9 <i>Economic Performance (Kinerja Ekonomi)</i>	33
2.1.10 Variabel Kontrol	35
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Pemikiran	39
2.4 Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	44
3.1.1 Variabel Dependen.....	44
3.1.2 Variabel Independen	45
3.1.3 Variabel Kontrol	47
3.2 Populasi dan Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	48
3.3 Teknik Analisis	50
3.3.1 Uji Normalitas Data	50
3.3.2 Uji Multikolinearitas	51
3.3.3 Uji Heterokedastisitas	52
3.3.4 Uji Autokorelasi.....	53
3.3.5 Uji Hipotesis	54

3.3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda	54
3.3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	56
3.3.5.3 Uji Signifikansi Pengaruh Simulatan (Uji F)	57
3.3.5.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian	58
4.1.1 Profil Perusahaan Sampel	59
4.2 Analisis Data.....	59
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	59
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	62
4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas Data.....	62
4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	64
4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	65
4.2.2.4 Hasil Uji Autokorelasi	66
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	67
4.2.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis.....	67
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Pengaruh <i>environmental performance</i> terhadap <i>economic performance</i>	72
4.3.2 Pengaruh <i>environmental disclosure</i> terhadap <i>economic performance</i>	75
BAB V PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Keterbatasan.....	80
5.3 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Lima Dimensi CSR, Penggunaan Skema Kode dan Contoh Frase	22
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Nilai Berdasarkan Peringkat PROPER	46
Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian	58
Tabel 4.2 Distribusi Berdasarkan Klasifikasi Jenis Industri	59
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	62
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Park.....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Durbin-Watson	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Stakeholder Model</i>	15
Gambar 2.2 Diagram <i>Sustainable Development</i>	19
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kriteria Peringkat PROPER.....	87
Lampiran B Indeks GRI.....	88
Lampiran C Daftar Perusahaan Sampel	90
Lampiran D Perbandingan <i>Environmental Disclosure</i> berdasarkan Indeks GRI dengan Peringkat PROPER	91
Lampiran E Data Mentah Sampel Penelitian.....	95
Lampiran F Histogram, Grafik P-Plot dan <i>Scatterplot</i>	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan hidup menjadi agenda penting masyarakat internasional di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972 setelah pelaksanaan konferensi internasional tentang *Human Environment* di Stockholm, Swedia dan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Sejak saat itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial.

Permasalahan lingkungan terus menjadi sorotan serta perbincangan, dan saat ini dalam dunia bisnis terjadi peningkatan usaha dalam hal pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan adanya dorongan dari luar perusahaan. Sebagai contoh adalah dorongan yang disebabkan oleh tekanan lingkungan. Tekanan tersebut bisa sangat berbeda dari tiap negara dan sektor bisnis. Tekanan lingkungan akan mengakibatkan perusahaan mencari sesuatu yang baru, kreatif serta hemat biaya untuk mengatur serta meminimalisasi pengaruh lingkungan.

Contoh mencolok dari tekanan lingkungan yang relevan dalam level internasional antara lain pertama adalah tekanan rantai nilai seperti perusahaan besar mewajibkan pemasok mereka untuk mengikuti standard *Environmental*

Management System (EMS) yang sesuai ISO. Kedua, tekanan untuk mengungkapkan kinerja lingkungan di dalam laporan keuangan tahunan atau dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*. Ketiga, tekanan pembiayaan melalui dana *worldwide growth of social responsible investment* (SRI), sistem penilaian investasi seperti pada *Dow Jones Sustainability Index* dan persyaratan pengungkapan peraturan investasi. Keempat, tekanan peraturan kendali seperti *RoHS Directive* yang merupakan peraturan di Uni Eropa yang mengatur penggunaan bahan kimia tertentu dalam peralatan elektrik yang dijual di wilayah tersebut. Kelima, tekanan pajak lingkungan seperti pajak penggunaan energi, biaya pengeluaran emisi dsb. Serta yang terakhir adalah adanya tekanan untuk mematuhi Protokol Kyoto mengenai masalah lingkungan hidup. Berry dan Rondinelli (1998) dalam Ja'far dan Arifah (2006) menyatakan kepedulian kepada lingkungan sebenarnya juga muncul akibat berbagai dorongan dari pihak luar perusahaan, antara lain: pemerintah, konsumen, *stakeholder* dan persaingan.

Di Indonesia, kebijakan ekonomi makro terkait dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi alam mulai dipikirkan oleh pemerintah. Adanya undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penerapannya di dalam industri dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi bukti bahwa pemerintah peduli terhadap pengelolaan lingkungan. Namun undang-undang dan peraturan tersebut perlu dievaluasi efektivitasnya di lapangan terkait dengan pengelolaan

lingkungan agar dalam prakteknya hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah regulasi semata.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bahkan telah membuat program yang disebut dengan PROPER sebagai bentuk penataan lingkungan hidup perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam hal menilai kinerja lingkungan perusahaan dan memacu agar perusahaan semakin baik dalam usaha peduli terhadap lingkungan. Respon baik atas program PROPER sebagai penilaian kinerja lingkungan perusahaan terus meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya jumlah kenaikan peserta dari tahun ke tahun dari 627 peserta di tahun 2006/2007 menjadi 750 peserta di tahun 2008/2009.

Ferreira (2004) dalam Ja'far dan Arifah (2006) menyatakan bahwa persoalan konservasi lingkungan merupakan tugas setiap individu, pemerintah dan perusahaan. Sebagai bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan perusahaannya dalam *annual report*. Hal ini karena terkait dengan tiga aspek persoalan penting: keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan dan kinerja sosial.

Di dalam bidang akuntansi, akuntan menjadi pihak yang berperan penting karena adanya akses bagi mereka untuk masuk ke dalam informasi keuangan sebuah perusahaan. Penilaian serta perhitungan yang dilakukan oleh akuntan akan mempermudah manajer dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Selain itu, dalam disiplin ilmu akuntansi *dislosure* biaya lingkungan telah lama dirumuskan dan keberadaannya dirasakan

semakin penting. Akuntansi mempunyai peranan penting sebagai media pertanggungjawaban publik (*public accountability*) atas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

Gray (1993) dalam Lindrianasari (2004) menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari laporan keuangan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa ada banyak studi yang menguji lebih lanjut mengenai informasi sosial yang dihasilkan oleh perusahaan dan menemukan bahwa informasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari informasi tersebut. Lebih jauh lagi, Gray menyatakan pengungkapan lingkungan merupakan bagian penting dari suatu laporan keuangan perusahaan. Persoalannya adalah pelaporan lingkungan dalam *annual report* di negara Indonesia yang masih bersifat *voluntary*. Perusahaan yang melakukan pelaporan ini memiliki beberapa alasan seperti menjaga reputasi perusahaan agar semakin banyak investor tertarik atau agar perusahaan tetap *survive* di lingkungan masyarakat sehingga tidak mengalami penolakan.

Beberapa peneliti mempertanyakan kualitas informasi yang disampaikan dalam pengungkapan lingkungan. Studi di Australia menunjukkan adanya *gap* antara *environmental disclosure* dengan *environmental performance*. Penemuan membuktikan bahwa kualitas pengungkapan belum memadai. Studi lain juga menemukan bukti bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan hal yang baik-baik saja dan menahan informasi lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap reputasi perusahaan, karena dianggap bahwa *bad news* dapat menurunkan

kepercayaan investor terhadap perusahaan dan dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan. Kinerja ekonomi atau *economic performance* bagi perusahaan dapat dilihat dari berbagai sudut seperti dari rasio keuangan ataupun tingkat perubahan pada pasar modal. Berdasarkan pada teori *stakeholder* maka kinerja ekonomi yang diukur adalah dari sudut pandang pasar modal dimana *environmental performance* dan *environmental disclosure* dilihat pengaruhnya terhadap tingkat *economic performance*.

Penelitian sebelumnya oleh Suratno, dkk (2006) menguji pengaruh *environmental performance* terhadap *environmental disclosure* dan pengaruh *environmental performance* terhadap *economic performance* yang hasilnya adalah signifikan. Sedangkan Almilia (2007) menguji pengaruh *environmental performance* dan *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada perusahaan pertambangan dan HPH/HPHTI yang hasilnya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan menambahkan pengujian pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* dan memperluas sampel penelitian dengan melakukan pengujian pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti program PROPER. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu dan merepresentasikan keadaan sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh kinerja serta pengungkapan lingkungan terhadap peningkatan kinerja ekonominya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana pengaruh *environmental performance* terhadap *economic performance* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh antara *environmental performance* terhadap *economic performance* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- b. Untuk menguji pengaruh antara kualitas *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman mengenai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang akuntansi lingkungan dan sosial serta *corporate sustainable management*.
- b. Bagi pemerintah sebagai dasar penetapan berbagai kebijakan standar pengelolaan lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan.
- c. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pertanggungjawaban perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan yang disebut *sustainability report* dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan.
- d. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini menguraikan fenomena empiris yang menjadi latar belakang penelitian. Selanjutnya bagian tersebut akan menguraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Telaah Pustaka. Bab ini menguraikan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan sistematika pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian.

Bab III, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang deskripsi operasional yang terdapat dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum sampel dan analisis data, serta beberapa pengujian yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan antara lain analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji hipotesis.

Bab V, Penutup. Bab ini adalah bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, keterbatasan dan saran-saran terhadap pengembangan teori dan aplikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Legitimacy Theory*

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi/perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma–norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi). Deegan (2002) menyatakan bahwa pengertian yang diberikan oleh teori legitimasi dibangun dari teori lain yaitu teori politik-ekonomi. Lindbolm (1994, hal 2) dalam Deegan (2002), mendefinisikan *legitimacy theory* sebagai berikut:

“... sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996). Tsang (1998) mendefinisikan *legitimacy* sebagai

“a generalized perceptions or assumptions that the actions of any entity are desirable within some socially constructed system of norms, values, belief, and definition”.

Berdasarkan definisi tersebut maka tujuan, metode operasi, dan output organisasi harus sesuai dengan norma dan nilai sosial. Lebih utama, organisasi harus *conform* dengan aturan masyarakat untuk menjamin *social approval* dan dapat terus eksis. Sesuai dengan hal tersebut, sistem akuntabilitas dan *social accounting* menjadi esensial untuk penerimaan operasi organisasi yang berkelanjutan (*continued approval of the organization's operations*) oleh masyarakat.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori *legitimacy* adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial bahwa

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.”

Jadi pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung

didalam masyarakat. Jika suatu perusahaan memenuhi kontrak implisit dengan *stakeholder*, *stakeholder* akan bertindak sebagaimana yang diinginkan perusahaan. Sebaliknya, ketika implisit kontrak dengan stakeholder tidak dipenuhi, maka terjadi kemungkinan kontrak yang implisit yang tentu saja akan berubah menjadi suatu hal yang eksplisit dan akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi

Biaya yang tinggi disebabkan masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan masyarakat. Implementasi riilnya adalah melalui pelaksanaan program *corporate social responsibility* dan mengungkapkannya baik di dalam *annual report* maupun *sustainability report* sebagai suatu bentuk informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat.

Teori *legitimacy* menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah” (Deegan, 2004).

2.1.2 *Stakeholder Theory*

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan (Budimanta dkk, 2008). Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam *stakeholder* perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan.

Di tahun 1963, *Stanford Research Institute* (SRI) mendefinisikan *stakeholder* secara sederhana, yaitu kelompok yang mampu memberikan dukungan terhadap keberadaan sebuah organisasi, tanpa dukungan dari kelompok ini, organisasi tersebut tidak dapat eksis. Para peneliti SRI kemudian menggolongkan pihak-pihak yang termasuk ke dalam *stakeholder*. Pihak-pihak tersebut adalah para pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat.

Banyak penelitian berusaha merumuskan siapa saja yang termasuk ke dalam *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer terdiri dari pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan kelompok *stakeholder* publik. Sedangkan yang termasuk ke dalam *stakeholder* sekunder adalah media dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan cakupan yang lebih luas (Cohen, Webb, Nath, dan Wood; 2009).

Stakeholder theory menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 2004). Hal ini disebabkan *stakeholder* dianggap dapat mempengaruhi tapi juga dapat dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

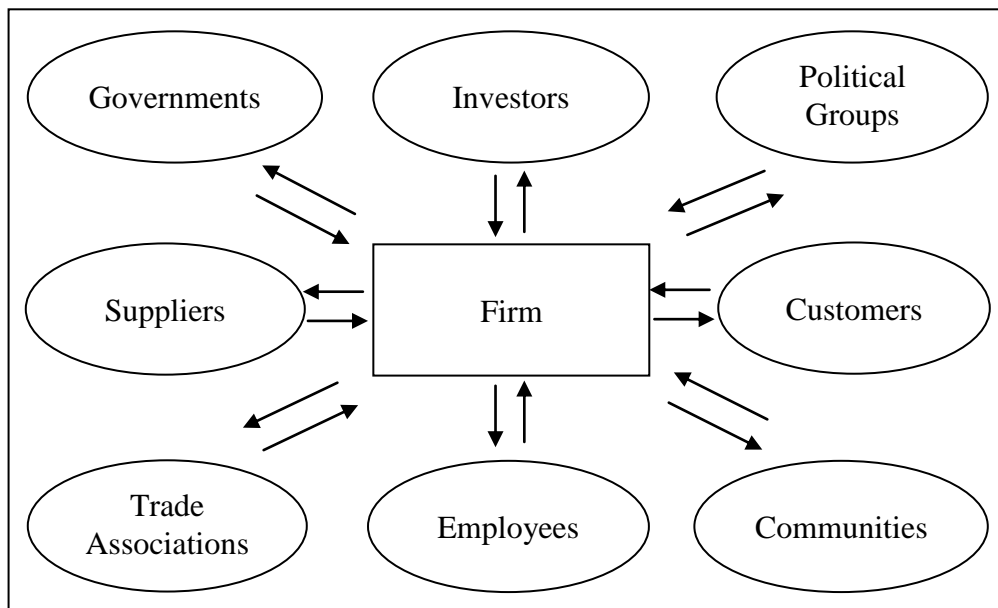
Perusahaan menganggap bahwa peran para *stakeholder* sangat berpengaruh bagi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan mereka. *Stakeholder* menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan karena mereka memegang posisi yang kuat dalam perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mempengaruhi pemakaian berbagai sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, *stakeholder theory* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengaruh *stakeholder* tersebut.

Alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*, yaitu : (1) Isu lingkungan melibatkan berbagai kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka, (2) Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan, (3) Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan

mengembangkan kebijakan dan program lingkungan, (4) LSM dan pecinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Gambar 2.1, yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara organisasi dengan para *stakeholder*. Panah yang saling mengarah menunjukkan bahwa kedua jenis saling berhubungan dan terjadi keterikatan antara organisasi dengan *stockholder*-nya.

Gambar 2.1
Stakeholder Model



Sumber: Donaldson and Preston

Perusahaan tidak hanya dianggap sebagai sebuah entitas ekonomi yang terpisah dari konteks sosial. Perusahaan justru merupakan bagian dari konteks sosial. Agar bisa bertahan, perusahaan harus memperoleh dukungan dan dapat diterima oleh para *stakeholder*-nya, baik *stakeholder* primer maupun *stakeholder*

sekunder (Clarkson, 1995) dalam (Cohen, Webb, Nath, dan Wood; 2009). Senada dengan pernyataan tersebut, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari hingga aktivitas perusahaan dengan *stakeholder*-nya (Gray, Kouhy, dan Adans; 1994) dalam (Ghozali dan Chariri, 2007).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ullman, 1982 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

2.1.3 Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 dalam *World Conservation Strategy* (Strategi

Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), dan *World Wide Fund for Nature* (WWF). Tahun 1982, UNEP menyelenggarakan sidang khusus memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan atas penanganan lingkungan selama ini. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development - WCED*).

Menurut *Brundtland Report* dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul “*Our Common Future*” (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada 1987. Laporan ini mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

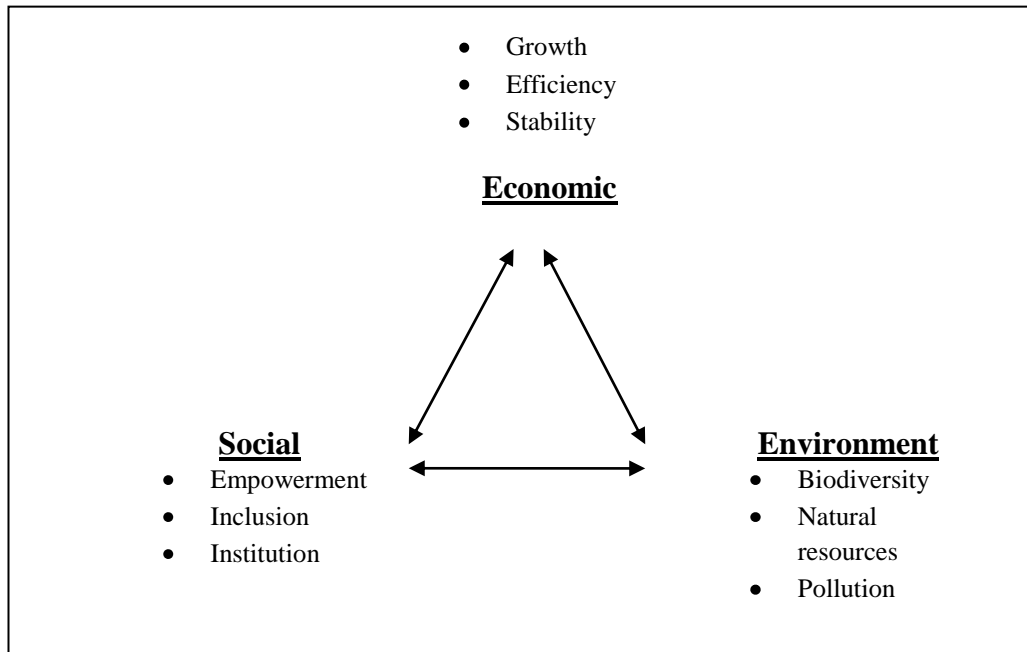
Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi

prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Budimanta (2005) menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan). Dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan dan menjadi cikal bakal munculnya konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Gambar 2.2
Diagram Sustainable Development



Sumber : *Encyclopedia of Earth*

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan seiring dengan meningkatnya upaya dunia untuk melestarikan lingkungan. CSR adalah bagian dari pencapaian tiga keberhasilan perusahaan yang terdiri dari ‘keberhasilan sosial, lingkungan, dan finansial’. Konsep yang disebut sebagai *triple bottom line success of a company* ini pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1997). Keseluruhan tanggungjawab tersebut dipandang sebagai kontribusi perusahaan dan dunia bisnis secara umum dalam mewujudkan *sustainable development*.

Belum terdapat definisi tunggal mengenai CSR, namun banyak peneliti maupun lembaga yang telah mengembangkan ide maupun pandangan mengenai CSR Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) definisi dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai:

“kelanjutan oleh suatu entitas bisnis untuk bertindak secara etis dan berperan untuk pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan terhadap keluarga mereka seperti halnya masyarakat lokal dan masyarakat yang lebih luas”.

Sedangkan menurut *Commission of the European Communities* (2001) definisi CSR adalah sebagai berikut:

“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”

Bagi *Commission of the European Communities* pengertian ini tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum tetapi juga untuk meraih tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas. Lebih lanjut, definisi menurut Bank Dunia:

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the lokal community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.”

Dalam CSR Forum, “CSR berarti bahwa praktek bisnis terbuka dan transparan, yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan perhatian terhadap para pekerja, masyarakat, dan lingkungan (Wibisono, 2007). *UK’s Confederation of British Industry* telah berargumen bahwa “CSR sangat berhubungan dan oleh karena itu tidak mempertimbangkan definisi yang bersifat universal yang bisa diterapkan”. Pada awalnya perusahaan melakukan aktivitas bisnis tanpa menghiraukan lingkungan sosial, namun belakangan perusahaan melakukan operasi bisnis intinya dengan cara bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan daya saing bisnis serta memaksimalkan nilai kesejahteraan masyarakat. Dan dalam perkembangannya CSR tidak hanya terkait kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Dahlsrud (2006) mengidentifikasi lima dimensi CSR, yaitu *environmental, social, economic, stakeholder, dan voluntaries*.

Tabel 2.1
Lima Dimensi CSR, Penggunaan Skema Kode dan Contoh Frase

Dimensi	Pengkodean definisi dimensi	Contoh frase dari 37 definisi yang dianalisis
<i>The environmental dimension</i>	<i>The natural environment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'a cleaner environment'</i> • <i>'environmental stewardship'</i> • <i>'environmental concerns in business operations'</i>
<i>The social dimension</i>	<i>The relationship between business and society</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'contribute to a better society'</i> <i>'integrated social concerns in their business operations'</i>
<i>The economic dimension</i>	<i>Socio-economic or financial aspects, including describing CSR in terms of a business operation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'contribute to economic development'</i> • <i>'preserving the profitability'</i>
<i>The stakeholder dimension</i>	<i>Stakeholder or stakeholder groups</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'interaction with their stakeholders'</i> • <i>'how organizations interact with their employees, suppliers, customers and communities'</i>
<i>The voluntariness dimension</i>	<i>Actions not prescribed by law</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'based on ethical values'</i> <i>'beyond legal obligations'</i>

Sumber: Dahlsrud, 2006

Di dalam CSR terdapat ide tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan peduli terhadap lingkungan (*caring for the*

environment). Penelitian yang dilakukan terkait dengan CSR yang berfokus pada dimensi lingkungan masih berjumlah sedikit. Dahlsrud (2006) menyatakan bahwa pengungkapan dimensi lingkungan memperoleh rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan dimensi yang lain. Tingkat rendahnya pengungkapan lingkungan ini disebabkan oleh perkembangan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan yang masih dalam tahap embrio jika dibandingkan dengan praktik pelaporan keuangan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Dalam mengungkapkan CSR, perusahaan dapat menggunakan berbagai macam alat yang efektif untuk mengkomunikasikan aktivitas CSR agar dapat mencapai sasaran dari pelaporan tersebut. Media yang digunakan untuk melaporkan dapat berupa *website* perusahaan, media massa, laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Di Indonesia, pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas di Indonesia telah diwajibkan melalui Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau yang memiliki aktivitas yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atas biaya mereka sendiri.

Sejak beberapa tahun terakhir Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyempurnakan aturan VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan, yang dituangkan dalam aturan baru bernomor X.K.6, tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Bapepam-

LK juga mewajibkan emiten atau perusahaan publik mengungkapkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan keterbukaan, informasi tentang keberadaan komite audit, nominasi dan remunerasi dalam perusahaan, pengendalian dan sistem pengawasan internal, peran dan tanggung jawab dewan komisaris, faktor risiko yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi dan pengelolaan risiko serta tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Sedikit celah di hampir sebagian besar laporan tahunan sering didapati karena di dalam *laporan* tersebut kurang mengungkapkan informasi–informasi sosial dan lingkungan secara optimal yang notabene dibutuhkan publik sehingga pengungkapan ini perlu diatur lebih tegas di dalam suatu peraturan. Dengan adanya keputusan Bapepam yang mengatur tentang pengungkapan CSR di dalam laporan tahunan, maka *annual report* dapat dianggap sebagai sumber informasi yang tepat untuk menggali informasi-informasi CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan.

2.1.5 *Environmental Performance* (Kinerja Lingkungan)

Suratno, dkk (2006) menyatakan bahwa *environmental performance* adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Pengukuran kinerja lingkungan merupakan bagian penting dari sistem manajemen lingkungan. Hal tersebut merupakan ukuran hasil dari sistem manajemen lingkungan yang diberikan terhadap perusahaan secara riil dan kongkrit. Selain itu, kinerja

lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan (ISO 14004, dari ISO 14001). Pengukuran kinerja lingkungan ditafsirkan bermacam cara. Antara lain kuantitatif, atau hasil proses serta kualitatif atau dalam proses. (Fiksel dalam Willig et.al. (ed), 1995 dalam Purwanto, 2000) mengklasifikasikan indikator kinerja secara umum sebagai:

Kualitatif, adalah ukuran yang didasarkan pada penilaian semantik, pandangan, persepsi seseorang berdasarkan pengamatan dan penilaiannya terhadap sesuatu. Keuntungan dari metrik ini adalah pengumpulan datanya relatif mudah dilakukan dan mudah diimplementasikan. Kerugiannya adalah metrik ini secara implisit melibatkan subjektivitas dan karenanya sulit divalidasi.

Kuantitatif, adalah ukuran yang didasarkan pada data empiris dan hasil numerik yang mengkarakteristikkan kinerja dalam bentuk fisik, keuangan, atau bentuk lain. Contohnya adalah batas baku mutu limbah. Keuntungan dari metrik ini adalah obyektif, sangat berarti, dan dapat diverifikasi. Kerugiannya adalah data yang diperlukan mungkin sulit diperoleh atau bahkan tak tersedia.

Menurut Bredrup (Rolstadas, 1995 dalam Purwanto, 2000) setiap perusahaan mempunyai struktur unik yang terbentuk pada fasilitas, peralatan, produk, kompetensi, dan infrastruktur. Kinerja bisnis sangat tergantung pada kecocokan antara struktur dengan persyaratan lingkungan. Kinerja lingkungan kualitatif adalah hasil dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol

aspek lingkungan fisiknya. Kinerja lingkungan kualitatif adalah hasil dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non fisik, seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami manusia pelaku kegiatan, dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran dan targetnya.

Indikator kualitatif perlu memiliki pola pengukuran yang jelas dan meliputi semua aspek yang ada dalam organisasi. Terdapat banyak cara mengukur kinerja lingkungan seperti halnya ISO 14001, CERES, *The Natural Step*, GRI, TQEM CGLI, dan *Balanced Scorecard*. Setiap metode tersebut memiliki jawaban tersendiri mengenai kinerja lingkungan, namun setiap jawaban adalah sebagian dari pertanyaan tersebut. (Pojasek, 2001 dalam Purwanto, 2000).

Indikator kinerja kuantitatif harus terkait dengan tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Indikator kinerja kualitatif bukan hanya mengukur motivasi kerja dan inovasi yang terjadi, namun juga mengukur iklim yang memungkinkan inovasi itu terjadi, iklim kerja yang membuat motivasi kerja karyawan meningkat, jadi faktor pendorongnya lebih ditekankan. Dasarnya adalah teori bahwa perasaan dan tindakan manusia pun adalah hasil atau respon terhadap apa yang terjadi disekitarnya (stimulus). (Covey, 1993 dalam Purwanto, 2000).

Khusus mengenai indikator kinerja lingkungan kuantitatif, model pendekatan pengukurannya adalah seperti halnya ISO 14031. Dalam model itu disebutkan 2 macam indikator kuantitatif yaitu: indikator kinerja lingkungan (*Environmental Performance Indicator / EPI*) dan indikator kondisi lingkungan (*Environmental Condition Indicator / ECI*). Mereka adalah parameter-parameter berbeda yang

menjelaskan potensi dampak aktifitas-aktifitas, produk, atau jasa pada lingkungan. Parameter-parameter ini adalah hasil dari mengkarakteristikkan intervensi lingkungan atau aspek-aspek lingkungan yang telah diklasifikasikan (Sturm, 1998 dalam Purwanto, 2000).

2.1.6 PROPER

Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternatif instrumen penataan sejak tahun 1995. Program ini dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Instrumen penataan ini dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penataan masing-masing perusahaan kepada *stakeholder* pada skala nasional.

PROPER bermaksud agar para *stakeholder* dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan ini, dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Sehingga pada akhirnya dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, PROPER merupakan *Public Disclosure Program for Environmental Compliance*. Tujuan penerapan PROPER adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kinerja penataan ini dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat

pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik.

Penerapan PROPER merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Mulai dari tahapan penyusunan kriteria penilaian PROPER, pemilihan perusahaan, penentuan peringkat, sampai pada pengumuman peringkat kinerja kepada publik. Dalam pelaksanaannya, PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria, antara lain perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, perusahaan yang berorientasi ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung dengan masyarakat, serta perusahaan publik.

Pada saat ini, penilaian kinerja difokuskan kepada penilaian penataan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan AMDAL. Penilaian untuk aspek *beyond compliance* dilakukan terkait dengan penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Konservasi dan

Pemanfaatan Sumber daya, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) termasuk kegiatan *Community Development*.

Peringkat kinerja penataan perusahaan PROPER dikelompokkan dalam 5 (lima) peringkat warna dengan 7 (tujuh) kategori. Masing-masing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja penataan terbaik adalah peringkat emas, dan hijau, selanjutnya biru, biru minus, merah, dan merah minus dan kinerja penataan terburuk adalah peringkat hitam. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2008 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran A.

2.1.7 *Environmental Disclosure* (Pengungkapan Lingkungan)

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *Voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

Jenis pengungkapan yang lain adalah *mandatory disclosure*. *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*, pelaporan jenis *mandatory* akan mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standard yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktek pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. *Mandatory disclosure* juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi.

Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pendukung pendapat tersebut menyatakan bahwa jika suatu informasi tidak diungkapkan hal ini disebabkan informasi tersebut tidak relevan bagi investor atau informasi tersebut telah tersedia di tempat lain.

Laporan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat non keuangan seperti CSR telah diatur dalam undang-undang dan bersifat *mandatory* melalui Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang no.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa hal yang mendukung namun berkaitan dengan aspek lingkungan, belum terdapat suatu peraturan yang benar-benar mengatur tentang pengungkapannya. *Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Pada umumnya terdapat pada bagian terpisah pada *Sustainability Report* atau tercantum

dalam *Annual Report*. Di Amerika, SEC bertanggungjawab pada masalah tingkat pengungkapan sedangkan format pengungkapan menjadi tugas FASB. Sedangkan di Indonesia yang memiliki otoritas pengungkapan *mandatory* (wajib) adalah Bapepam.

2.1.8 Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative pertama kali disusun pada tahun 1997 oleh *The Boston-based Coalition on Environmentally Responsible Economies* (CERES) bekerjasama dengan Tellus Institute. Selama lebih dari lima tahun terakhir, GRI telah masuk dalam kriteria kerangka laporan dalam semua aspek perkembangan perusahaan. GRI tersedia sebagai sarana internal untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan *sustainability* perusahaan dan strategi yang digunakan, serta kegiatan aktual lainnya.

GRI mengeluarkan *The Sustainability Reporting Guidelines* sebagai *draft* pembuka bagi tanggapan dan pengujian publik dan sebanyak dua puluh satu perusahaan dari seluruh dunia menjadi proyek percontohan bagi panduan tersebut. Dan ratusan *stakeholder* dari seluruh dunia menyediakan komentar yang substantif. Tahun 2000, GRI meluncurkan *The Sustainability Reporting Guidelines* yang telah diadopsi oleh kurang lebih seratus perusahaan di seluruh dunia. Di tahun 2002, GRI diadopsi oleh UN dan *The UN Global Compact* seperti yang disebutkan dalam dokumen EU dalam Kerangka CSR Eropa. Dari relasi sosial berdasarkan NGO lokal telah menjadi standar global yang didukung oleh

bisnis, pemerintah, dan komunitas masyarakat. Secara umum, diantara bentuk inisiatif perusahaan yang lain, dokumen ini mengambil bentuk baru dalam relasi sosial, seperti bisnis, NGO, dan organisasi keuangan.

GRI sendiri adalah adopsi dari *The UN Environment Programme* (penyandang dana dari *UN Development Fund*) yang saat ini telah menjadi organisasi independen. GRI dibangun di atas dasar pemikiran yang sederhana. GRI menawarkan mekanisme persetujuan pihak ketiga, yakni proses pencapaian tujuan melalui negosiasi diantara mitra kerja, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan sosial dan standar lingkungan. Tujuan GRI adalah untuk membantu para investor, pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum untuk memahami lebih jelas mengenai proses peningkatan dalam pencapaian keberlanjutan (*sustainability*).

GRI memiliki dukungan yang kuat dari perusahaan dan NGO di seluruh dunia yang merupakan pertemuan *multistakeholder* untuk mencari isu verifikasi secara umum. GRI ini mendorong perusahaan untuk menyusun target. Untuk kemudian perusahaan melaporkan atau tidak target yang telah dicapai tersebut. Jika perusahaan tidak menemukan targetnya, maka mereka harus memberikan alasannya. Dengan cara ini, *stakeholder* memiliki parameter yang dapat menjadi pegangan mengenai akuntabilitas perusahaan.

GRI juga mendorong organisasi untuk membuat perjanjian dengan *stakeholder* dan dapat memilih indikator kemajuan perusahaan yang paling relevan untuk kedua hal tersebut, yakni pelaporan organisasi dan hubungan

dengan para *stakeholder*-nya. Pertanyaan mengenai GRI yang termasuk dalam hal itu adalah bagaimana perusahaan dapat berkomunikasi dengan *stakeholder*-nya dan dalam isu apa yang harus dilaporkan.

2.1.9 *Economic Performance* (Kinerja Ekonomi)

Menurut Suratno, dkk (2006) *economic performance* adalah kinerja ekonomi secara makro dari sekumpulan perusahaan dalam suatu industri. Pengukuran kinerja ekonomi dapat dihitung menurut *accounting based measures* maupun *capital market based*. Pada *accounting based measures* dapat menggunakan analisis rasio keuangan sebagai pengukuran secara *financial*. Penggunaan analisis rasio berdasarkan interpretasi dan menganalisis laporan keuangan menggunakan ukuran tertentu. Analisis Rasio Keuangan pada dasarnya terdiri atas dua macam perbandingan yakni:

- a. Dengan cara membandingkan rasio waktu tertentu dengan rasio dari waktu sebelumnya dari perusahaan yang sama. Cara ini akan memberikan informasi perubahan rasio dari waktu ke waktu sehingga bisa diketahui perkembangannya dan dapat untuk proyeksi pada masa yang akan datang.
- b. Dengan cara membandingkan rasio keuangan dari satu perusahaan tertentu dengan rasio keuangan yang sama dari perusahaan lain yg sejenis atau industri (rasio industri).

Dilihat dari sumber di mana rasio itu dibuat, maka rasio dapat digolongkan dalam tiga golongan yakni:

- a. Rasio Neraca (*Balance sheet ratios*)
- b. Rasio laporan Rugi & Laba (*Income statement ratios*)
- c. Rasio antar laporan (*Inter-statement ratios*)

Pada penelitian terdahulu, Bragdon dan Malin (1972) dalam Al Tuwaijri, et al (2004) menggunakan *accounting based measures* (*earnings per share* dan ROE). Sedangkan Spicer (1978) dalam Al Tuwaijri, et al (2004) menggunakan keduanya baik *accounting based measures* maupun *capital market based* (*profitability* dan *price earning ratio*). Kelemahan menggunakan berbagai macam pengukuran *economic performance* adalah mereka cenderung untuk fokus pada satu aspek kinerja ekonomi suatu perusahaan. *Net income* mengukur tingkat *profitabilitas* tanpa mempertimbangkan ukuran perusahaan, kelemahan ini dapat dilengkapi dengan menggunakan pengukuran seperti ROA dan skala *profitabilitas* investasi perusahaan berdasarkan aset mereka. Namun hal ini akan menjadi bias apabila sampel tersebut meliputi perusahaan dari berbagai industri (Al Tuwaijri, et al., 2004).

2.1.10 Variabel Kontrol

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara *environmental performance* dan *environmental disclosure* terhadap *economic performance* menambah variabel-variabel seperti *Profit Margin*, *Environmental Concern*, *Firm Size*, dan *Ownership*. Penelitian ini memasukkan beberapa dari faktor-faktor tersebut dan menambah faktor-faktor lain yang dinilai mempengaruhi hubungan *environmental*

performance dan *environmental disclosure* terhadap *economic performance*. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan atau menghilangkan pengaruh tertentu pada model penelitian.

1. *Profit Margin*

Al Tuwaijri, *et al.*, (2004) menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh *profit margin* yang lebih tinggi dengan meningkatkan harga penjualan, mengurangi biaya, atau melakukan keduanya. Di pasar yang kompetitif, karena perusahaan memiliki potensi terbatas untuk meningkatkan harga, kontrol biaya menjadi hal penting. Diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan yang relatif besar beroperasi di pasar global yang kompetitif. Oleh karena itu, *profit margin* yang lebih tinggi mengindikasikan pengendalian biaya yang lebih baik, dan indikator ini harus positif terkait dengan kinerja ekonomi.

2. *Environmental Concern*

Environmental Concern sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Al Tuwaijri, *et al.*, (2004) membagi *Environmental Concern* atas tiga hal yaitu (1) adanya komite atau departemen yang mengawasi dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan, (2) jumlah laporan terkait dengan lingkungan yang terpisah dari *annual*, dan (3) partisipasi dalam kegiatan berkaitan dengan isu lingkungan. Menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, *environmental concerns* difokuskan pada bagaimana perusahaan terlibat dalam pengelolaan lingkungan perusahaan yaitu dengan mengikuti sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001.

3. *Firm Size*

Atiase (1985) dalam Al Tuwaijri, *et al.*, (2004) menemukan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu *proxy* untuk informasi lingkungan perusahaan, dimana lingkungan kaya informasi berhubungan dengan perusahaan yang lebih besar.

4. *Ownership*

Kepemilikan modal dalam perusahaan diklasifikasikan menjadi Penanam Modal Asing, Penanam Modal Dalam Negeri dan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan *press release* PROPER sejak tahun 2006-2009, tingkat penataan perusahaan PMDN paling rendah yaitu 63%, dibandingkan dengan BUMN 68% dan yang tertinggi adalah perusahaan PMA yang mencapai 80%. Terkait dengan kinerja *Beyond Compliance* perusahaan PMA memperoleh peringkat Hijau paling banyak (22) dan satu perusahaan mempunyai peringkat emas. Sementara PMDN memperoleh peringkat Hitam paling banyak yaitu mencapai 24 perusahaan. Namun demikian, masih ada beberapa perusahaan PMA dan BUMN yang mendapatkan peringkat Hitam, masing-masing PMA 13 perusahaan dan BUMN 10 perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai CSR telah berkembang dan menjadi banyak objek penelitian. Namun spesifikasi mengenai isu lingkungan tidak terlalu banyak dilakukan. Penelitian Al Tuwaijri, *et al.* (2004) melakukan penelitian yang

menyatakan adanya hubungan positif signifikan antara *economic performance* dengan *environmental performance*. Hal tersebut konsisten dengan penelitian Porter dan van der Linde (1995) dalam Suratno, dkk (2006) bahwa *environmental performance* yang baik akan diberi penghargaan di pasar.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *environmental performance* dengan *economic performance* telah melaporkan beberapa hasil yang tidak konsisten. Bragdon dan Marlin (1972) dalam Suratno, dkk. (2006) menemukan suatu hubungan positif antara *profitabilitas* (laba per lembar saham dan return modal) dengan peringkat *environmental performance* perusahaan kertas dari *Counsel of Economic Priorities* (CEP). Sedangkan Spicer (1978) dalam Suratno, dkk. (2006) menggunakan perusahaan yang berada dalam industri kertas untuk mengukur hubungan antara lima variabel spesifik perusahaan yaitu *profitabilitas*, ukuran, resiko total, resiko sistematis dan rasio laba per lembar saham dengan pemeringkatan kinerja polusi menurut CEP dan menemukan semua tanda memiliki kesamaan arah seperti yang dihipotesiskan.

Rockness, et al. (1986) dalam Suratno, dkk. (2006) menguji buangan limbah beresiko dalam industri bahan kimia dengan menggunakan data *environmental performance*. Rockness, et al. (1986) gagal mendokumentasi hubungan yang signifikan secara statistik dalam pengujian hubungan antara dua variabel limbah buangan dengan 12 indikator keuangan yang mewakili *economic performance*. Almilia (2007) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *economic performance* dengan *environmental performance* dengan sampel perusahaan

industri pertambangan umum dan pemegang HPH/HPHTI. Penelitian tersebut konsisten dengan Sarumpaet (2005) yang melakukan penelitian hubungan antara *environmental performance* dan *financial performance* perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penelitian Suratno, dkk (2006) juga membuktikan bahwa *environmental performance* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *environmental disclosure* sesuai dengan temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Li, et al. (1997) dan Al-Tuwaijri, et al. (2004) yang menemukan hubungan positif signifikan antara *environmental disclosure* dengan *environmental performance*. Sebaliknya, temuan ini tidak mendukung Ingram dan Frazier (1980), Wiseman (1982), Freedman dan Wasley (1990), Rockness (1985) dalam Suratno, dkk (2006) yang menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *environmental disclosure* dengan *environmental performance*.

Almilia (2007) meneliti pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada perusahaan pertambangan dan HPH/HPHTI di Indonesia dan hasilnya adalah tidak signifikan. Hal tersebut konsisten dengan Freedman dan Jaggi (1992) melakukan penelitian hubungan *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada empat jenis industri di Amerika secara keseluruhan dan hasilnya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Namun, dalam pengujian dengan sampel industri pertambangan menunjukkan hasil yang positif signifikan.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Peter M. Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, Florin P. Vasvari; 2007	<i>Revisiting the Relation between Environmental Performance and Environmental Disclosure: an Empirical Analysis</i>	Menguji pengaruh <i>environmental performance</i> dan <i>environmental disclosure</i> berdasarkan <i>economics based</i> dan <i>socio-political theories of voluntary disclosure</i>	Terdapat hubungan positif antara <i>environmental performance</i> dan <i>level of discretionary environmental disclosure</i>
Luciana Spica Almia dan Dwi Wijayanto; 2007	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> dan <i>Environmental Disclosure</i> terhadap <i>Economic Performance</i>	Menguji pengaruh <i>environmental performance</i> terhadap <i>economic performance</i> dan pengaruh <i>environmental disclosure</i> terhadap <i>economic performance</i>	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara <i>environmental performance</i> terhadap <i>economic performance</i> dan <i>environmental disclosure</i> terhadap <i>economic performance</i>
Ignatius Bondan Suratno, Darsono, Siti Mutmainah; 2006	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i> dan <i>Economic Performance</i>	Menguji pengaruh <i>environmental performance</i> terhadap <i>environmental disclosure</i> , dan pengaruh <i>environmental performance</i> terhadap <i>economic</i>	Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara <i>environmental performance</i> terhadap <i>environmental disclosure</i> dan <i>environmental</i>

		<i>performance</i>	<i>performance</i> terhadap <i>economic</i> <i>performance</i>
Sulaiman A. Al-Tuwaijri, Theodore E. Christensen, K. E. Hughes II; 2003	<i>The Relations among Environmental Disclosure, Environmental Performance, and Economic Performance: A Simultaneous Equations Approach</i>	Menguji hubungan <i>economic performance</i> dengan <i>environmental performance</i> dan antara <i>environmental disclosure</i> dengan <i>environmental performance</i>	Terdapat hubungan positif antara <i>economic performance</i> dengan <i>environmental performance</i> dan signifikan antara <i>environmental disclosure</i> dengan <i>environmental performance</i>
Susi Sarumpaet; 2005	<i>The Relationship Between Environmental Performance And Financial Performance Of Indonesian Companies</i>	Menguji bahwa tidak ada pengaruh antara <i>environmental performance</i> dengan <i>financial performance</i>	Tidak ada pengaruh signifikan <i>environmental performance</i> terhadap <i>financial performance</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Berkembangnya isu CSR mendorong perusahaan berlomba-lomba untuk menuju perusahaan yang dikatakan ‘peduli’ melalui program-program CSR yang dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berharap dengan melakukan praktik CSR maka mereka akan mendapatkan pengakuan di masyarakat dan memenuhi kontrak sosial mereka terhadap masyarakat. Sehingga meskipun dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, hal tersebut tidak

menjadi suatu masalah karena dapat menjadi suatu nilai tukar investasi jangka panjang.

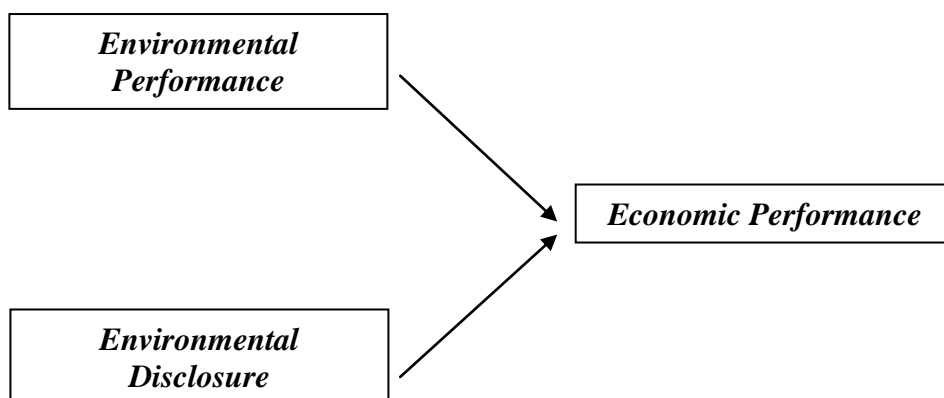
Di dalam penelitian ini lebih berfokus membahas pada masalah lingkungan yang merupakan bagian dari item pengungkapan dalam CSR. Isu lingkungan menjadi suatu isu yang populer dan mendapatkan banyak sorotan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Berbagai institusi maupun lembaga mulai dari pemerintah hingga masyarakat berlomba-lomba menyuarakan mengenai masalah ini. Pemerintah dengan tegas telah mengatur tentang pelestarian dalam undang-undang. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup membuat program penilaian penaatan lingkungan bagi perusahaan yang disebut dengan PROPER. Perusahaan yang mendapatkan penilaian dari PROPER akan mendapatkan berbagai peringkat sesuai dengan tingkat kinerja lingkungan. Namun pemberian peringkat juga dipertanyakan apakah hanya sekedar label ataukah memang perusahaan tersebut benar-benar telah memiliki kinerja lingkungan yang bagus.

Environmental performance diproksikan berkaitan dengan suatu *trade off* yaitu ketika perusahaan mengeluarkan biaya terkait dengan aspek lingkungan maka secara otomatis akan membangun citra yang baik di mata *stakeholder*. Hal tersebut yang dianggap sebagai *trade off* investasi. Perusahaan yang memiliki *environmental performance* yang baik juga merupakan *good news* bagi investor dan calon investor sehingga akan direspon secara positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan.

Konsep *environmental disclosure* sesuai dengan model *discretionary disclosure* menurut Verrecchia (1983) dalam Suratno, dkk (2006), bahwa pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa mengungkapkan *performance* mereka menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi *stakeholder* khususnya investor sebab pengungkapan informasi mengenai hal tersebut merupakan kebutuhan bagi *stakeholder* (Suratno, dkk., 2006).

Perusahaan yang memiliki *good news* yang lebih cenderung akan meningkatkan *environmental disclosure* dalam laporan tahunannya. Sehingga serupa dengan *environmental performance*, *good news* akan direspon secara positif oleh Kerangka penelitian teoritis yang diajukan dalam penelitian adalah berdasarkan prediksi pengaruh *environmental performance* dan *environmental disclosure* terhadap *economic performance*.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Perusahaan dengan tingkat *environmental performance* yang tinggi memiliki nilai jangka panjang yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat *environmental performance* yang rendah. Dari segi biaya, bahwa *environmental performance* yang baik mengurangi pengungkapan biaya-biaya lingkungan masa depan perusahaan. Hal ini berdasarkan teori legitimasi bahwa perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan masyarakat. Biaya yang tinggi akan terjadi bila masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Efek dari pengungkapan informasi biaya-biaya lingkungan akan dirasakan sebagai berita gembira oleh investor. Menurut Suratno, dkk (2006) informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi *stakeholder* khususnya investor sebab pengungkapan informasi mengenai hal tersebut merupakan kebutuhan bagi *stakeholder*. Hubungan antara *environmental performance* terhadap *economic performance* dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: *Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Economic Performance* pada perusahaan di Indonesia

Environmental disclosure merupakan item yang cukup penting ketika perusahaan melakukan *disclosure* dalam *annual* maupun *sustainability report*. Penelitian Suratno, dkk (2006) membuktikan bahwa *environmental performance* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *environmental disclosure*. Serupa

dengan Al-Tuwaijri, et al. (2004) yang menemukan hubungan positif signifikan antara *environmental disclosure* dengan *environmental performance*. Sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan dengan *environmental disclosure* yang tinggi cenderung memiliki tingkat *environmental performance* yang tinggi. Perusahaan dengan *environmental performance* yang tinggi lebih disukai dibanding dengan yang memiliki tingkat *environmental performance* rendah. Selain itu, perusahaan yang mengungkapkan tingkat *environmental disclosure* dengan baik maka semakin memiliki transparansi pengungkapan yang bagus. *Environmental Disclosure* ini sejalan dengan *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 2004). Hubungan antara *environmental disclosure* terhadap *economic performance* dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: *Environmental Disclosure* berpengaruh terhadap *Economic Performance* pada perusahaan di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah suatu variabel yang dikenai pengaruh dan diterangkan oleh variabel lain atau variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *economic performance*. *Economic performance* merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri sejenis yang ditandai dengan *return* tahunan industri yang bersangkutan (Suratno, dkk., 2006).

Menurut Al-Tuwaijri, et al. (2004) *economic performance* dinyatakan dalam skala yang dihitung dengan:

$$EcP = \frac{(P_1 - P_0)}{P_0} - RI$$

Keterangan : EcP = *economic performance*

P₁ = harga saham akhir tahun (*adjusted dividend* dan *stock split*)

P₀ = harga saham awal tahun

RI = *return* industri

Return industri diperoleh dengan cara mengukur indeks industri yang terdapat dalam laporan *Indonesia Stock Exchange* (IDX)

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah suatu variabel yang fungsinya mempengaruhi variabel lain atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Di dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah *environmental performance* (kinerja lingkungan) dan *environmental disclosure*.

a. *Environmental Performance* (Kinerja Lingkungan)

Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (Suratno, dkk., 2006). *Environmental performance* diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh perusahaan dalam PROPER. PROPER merupakan sebuah program yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi.

Di dalam PROPER terdapat sistem penilaian kinerja yang ditunjukkan oleh warna sesuai dengan peringkat kinerja. Di tahun 2006-2008 terdapat lima peringkat warna dengan tujuh kategori yaitu, emas, hijau, biru, biru minus, merah, merah minus dan hitam. Warna emas merupakan peringkat tertinggi berurutan dengan warna lain hingga warna hitam sebagai peringkat terendah. Di dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan cara memberikan nilai sesuai dengan peringkat warna yang diperoleh perusahaan. Beberapa dari perusahaan yang mengikuti PROPER adalah cabang/unit/divisi. sehingga akan dilakukan

perhitungan nilai rata-rata. Nilai berdasarkan peringkat perusahaan ditampilkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Nilai Berdasarkan Peringkat PROPER

Peringkat Warna	Nilai
Emas	7
Hijau	6
Biru	5
Biru Minus	4
Merah	3
Merah Minus	2
Hitam	1

b. *Environmental Disclosure*

Environmental disclosure merupakan pengungkapan informasi terkait lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno, dkk., 2006). Pengukuran *environmental disclosure* dapat diperoleh melalui pengungkapan CSR dalam *annual reports* maupun melalui *sustainability report* yang biasanya terpisah. Penilaian menggunakan Indeks GRI yang telah dipakai oleh kurang lebih 1500 perusahaan di 60 negara. Di tahun 2002, GRI diadopsi oleh UN dan *The UN Global Compact* seperti yang disebutkan dalam dokumen EU dalam Kerangka CSR Eropa. Indeks ini memiliki format dan isi laporan yang paling lengkap dalam menyediakan informasi. Berdasarkan bidang lingkungan (*environment*), Indeks GRI terdiri dari 1 dimensi dan 9 aspek. Secara rinci, kategori pengungkapan

kinerja lingkungan yang sesuai dengan pedoman GRI dapat dilihat pada lampiran B.

Dalam penelitian ini, pengukuran *item environmental disclosure* dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$N = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian antara lain:

a. *Profit Margin*

Diukur dari rasio laba bersih terhadap penjualan bersih untuk mengungkap profitabilitas dan kehadiran pasar yang kompetitif.

b. *Environmental Concern*

Diukur dari partisipasi perusahaan mengikuti program sertifikasi ISO 14000. Tingkat partisipasi ini dinyatakan dalam bentuk angka yang menyatakan bahwa perusahaan telah mengikuti program sertifikasi ISO 14001. Informasi mengenai keikutsertaan perusahaan mengikuti ISO diperoleh dari database Kementerian Lingkungan Hidup dan sumber lainnya. Nilai 0 diberikan bagi perusahaan yang belum mengikuti sertifikasi dan 1 bagi perusahaan yang telah mengikuti sertifikasi.

c. *Firm Size*

Firm size merupakan besar atau kecilnya suatu perusahaan, yang ditunjukkan melalui jumlah total asset perusahaan pada akhir tahun. *Firm size* diperoleh dengan mengambil data *total asset* dengan satuan milyar rupiah, selanjutnya mentransformasi data *total asset* ke dalam bentuk logaritma natural (Ln), Formulasi menghitung *firm size* secara manual ditunjukkan sebagai berikut:

$$Firm\ Size\ (Sz) = Ln\ Total\ Asset$$

Keterangan:

Ln = Logaritma natural.

d. *Ownership*

Diukur berdasarkan jenis permodalan perusahaan tersebut, yaitu PMA, PMDN dan BUMN. Masing-masing PMA diberi nilai 1, PMDN dengan nilai 2, dan BUMN dengan nilai 3.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2009. Alasan pemilihan periode 2006-2009 sebagai sampel dikarenakan tahun tersebut merupakan periode terbaru diterbitkannya PROPER yaitu 2006/2007 dan 2008/2009. Data PROPER yang digunakan hanya pada tahun 2006-2008 disebabkan *annual report* tahun 2010 belum diterbitkan sehingga tidak dapat melihat dampak *economic performance* untuk tahun 2009. Sampel diambil

dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* dipilih dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representatives* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria sampel yang akan digunakan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang terdaftar di BEI selain bank dan lembaga keuangan untuk tahun 2006-2009 yang dapat diakses (tidak *underconstruction*) saat pengumpulan data dilakukan. Alasan perusahaan selain bank dan non keuangan tidak menjadi bagian dari sampel adalah perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan lingkungan.
- b. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) lengkap selama tahun 2006-2009.
- c. Mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) atau selama tahun 2006-2008.
- d. Perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) pada tahun 2006-2008.
- e. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan.

Data diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com dan langsung dari *website* perusahaan. Data yang diambil dari *website* berupa data laporan tahunan perusahaan (*annual report*) perusahaan non-keuangan yang *listed* di BEI pada tahun 2006-2009 dengan cara *download* semua data laporan tahunan yang dibutuhkan. Sedangkan data PROPER tahun 2006-2008 diperoleh dengan *download* melalui www.menlh.com

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan langkah studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2006-2009. Selanjutnya adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, internet serta sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.3 Teknik Analisis

3.3.1 Uji Normalitas Data

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika hal tersebut dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi suatu residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan dilakukan dengan dua cara yaitu, analisis grafik dan uji statistik.

Analisis grafik untuk mendeteksi normalitas, dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik normal plot atau dengan melihat histogram dari residualnya. Model regresi dinyatakan memenuhi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Kelemahan analisis grafik adalah memberikan hasil yang kurang akurat karena hanya secara visual

saja terlihat normal namun secara statistik dapat terjadi hal yang sebaliknya, khususnya untuk sampel dalam jumlah kecil.

Selanjutnya uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail agar dapat menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Menurut Ghazali (2006) normalitas dapat terjadi apabila hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05. Nilai signifikansi dari residual yang terdistribusi secara normal jika nilai *Asymp. Sig (1-tailed)* dalam uji *One-Sample kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari 0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam *ANOVA* terdapat variabel *residual* atau pengganggu yang terdistribusi secara normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Dalam sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat hubungan antar sesama variabel-variabel independennya. Menurut Ghazali (2006), untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dilakukanlah uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas di dalam sebuah model regresi dapat dicermati dari hal-hal berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika nilai *tolerance*-nya kurang dari 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikoliniearitas dan sebaliknya jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka terjadi multikoliniearitas.

- b. Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya jika nilai VIF diatas 10, maka terjadi multikolinearitas

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila *variance* dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika *variance* nya berbeda maka disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Dasar analisisnya adalah pada grafik *scatterplot*, yaitu:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas.

Analisis dengan menggunakan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena hasil plotting dipengaruhi oleh jumlah pengamatan. Semakin sedikit jumlah pengamatan akan semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot. Untuk menjamin keakuratan ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan uji statistik Park.

Uji Park dilakukan dengan cara regresi utama dengan menggunakan variabel-variabel yang akan diteliti dan dapatkan variabel residualnya (U_i). Kemudian nilai residual tersebut dikuadratkan (U_i^2) dan menghitung logaritma dari kuadrat residualnya ($\ln U_i^2$) lalu masukkan persamaan regresi. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik berarti terdapat heteroskedastisitas. Apabila parameter beta tidak signifikan secara statistik berarti tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$. Jika terdapat kesalahan autokorelasi, maka disebut *problem* autokorelasi (Ghozali, 2006). Permasalah autokorelasi timbul karena biasanya pada data *time series* yang disebabkan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *time series*. Untuk mendeteksi digunakan alat uji Durbin Watson (DW) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2007):

- a. Bila nilai DW terletak antara batas atas (*upper bound*) dan $(4-DU)$, maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound*), maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai $DW > (4-DL)$, maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.

- d. Bila nilai DW terletak antara DU dan DL atau DW terletak antara (4-DU) dan (4-DL), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Apabila terjadi autokorelasi dalam model, terdapat beberapa cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut yaitu salah satunya dengan memasukkan *lag* variabel dependen ke dalam model regresi (Firdaus, 2004).

3.3.5 Uji Hipotesis

3.3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan memenuhi asumsi normalitas, serta tidak terjadi multikolonieritas dan heterokedastisitas, kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi yaitu, suatu model dimana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas (Firdaus, 2004). Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yaitu, *environmental performance* dan *environmental disclosure* terhadap variabel dependen *economic performance*.

Dalam penelitian ini, model pengujian hipotesis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{EcP}_{t+1} = & \alpha + \beta_1 \text{EnP}_t + \beta_2 \text{EnD}_t + \beta_3 \text{PM}_t + \beta_4 \text{EnC}_t + \beta_5 \text{SZ}_t \\ & + \beta_6 \text{Own}_t + \varepsilon \end{aligned}$$

Setelah dilakukan uji asumsi menjadi:

$$\text{EcP}_{t+1} = \alpha + \beta_1 \text{EnP}_t + \beta_2 \text{EnD}_t + \beta_3 \text{PM}_t + \beta_4 \text{EnC}_t + \beta_5 \text{Sz}_t + \beta_6 \text{Own}_t + \beta_7 \text{LagEcP} + \varepsilon$$

Keterangan:

α	= konstanta
β_{1-2}	= koefisien dari variabel independen
β_{3-6}	= koefisien dari variabel control
t	= tahun data penelitian
EcP	= <i>economic performance</i> (tingkat kinerja ekonomi perusahaan)
EnP	= <i>environmental performance</i> (tingkat kinerja lingkungan suatu perusahaan)
EnD	= <i>environmental disclosure</i> (tingkat pengungkapan item lingkungan dalam <i>annual</i> atau <i>sustainability report</i>)
PM	= <i>profit margin</i> (margin keuntungan)
EnC	= <i>environmental concern</i> (perhatian perusahaan pada lingkungan)
Sz	= <i>firm size</i> (ukuran perusahaan)
Own	= jenis perusahaan berdasarkan penanam modal
LagEcP	= variabel tambahan untuk mengatasi adanya masalah autokorelasi

3.3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik di dalam suatu analisis regresi. Selain itu, pengujian bertujuan untuk menguji tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai *adjusted R²* yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai *adjusted R²* yang kecil atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila terdapat nilai *adjusted R²* bernilai negatif maka dianggap bernilai 0 (Ghozali, 2006).

Kelemahan penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap adanya tambahan satu variabel independen, maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Sehingga dalam mengevaluasi model regresi terbaik, digunakan nilai *Adjusted R²* yang nilainya dapat naik dan turun.

3.3.5.3 Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006). Penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas $> 0,05$, maka semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
- b. Apabila probabilitas $< 0,05$, maka semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.3.5.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji t dilakukan dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikansi. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis tidak dapat ditolak. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.